

BAB II

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

A. Visi

Visi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan rumusan umum yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007. Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Renstrada Tahun 2002-2007, adalah :

“Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”.

Pemahaman lebih dalam terhadap visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Jakarta sebagai Ibukota Negara dan kota perdagangan dan jasa, hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional; (2) Jakarta hendaknya dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya; dan (3) Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

B. Misi

Sebagai penjabaran visi tersebut, maka misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau;
2. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat;
3. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota;

4. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota;
5. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

Pemahaman lebih dalam terhadap misi pembangunan Jakarta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif; (2) pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya; (3) kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis; (4) keamanan, ketentraman dan ketertiban kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan prakondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif; (5) pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparatur yang profesional, memiliki *spirit*, etos kerja dan komitmen tinggi, serta didukung sistem informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.